

Korea Utara di Perang Rusia-Ukraina: Strategi Pengalihan Tensi Konflik di Semenanjung Korea

Wasis Waskito¹
Fathania Queen Genisa²

Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta^{1,2}

Email: wasiswaskito@upnyk.ac.id¹, fathaniaqueen@upnyk.ac.id²

ABSTRACT

The Trilateral agreement between South Korea, the United States of America, and Japan has escalated tensions in East Asia, particularly within the Korean Peninsula. Under escalated tension, North Korea strengthened military cooperation with Russia and supported the invasion of Ukraine by sending military troops and arms. This article analyzes that phenomenon to answer the question of why North Korea was willing to cooperate militarily in the middle of escalated tensions within the Korean Peninsula. Data was collected from primary sources, such as official documents, and secondary sources, such as news and academic articles. Through the lens of the balance of power, this article argues that North Korea has been trying to strengthen its manpower, obtain economic benefits, and divert the US' attention from Korean peninsula tension. North Korea used this tactic to prepare itself for potential conflict ahead.

Keywords: *Russia's Invasion to Ukraine, North Korea, Balance of Power, Korean Peninsula*

ABSTRAK

Kerja sama trilateral Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang membuat situasi di Asia Timur, terutama di Semenanjung Korea semakin memanas. Di tengah eskalasi tersebut, Korea Utara memperkuat kerja sama pertahanan dengan Rusia dan membantu invasi ke Ukraina dalam bentuk pengiriman prajurit dan persenjataan. Artikel ini menganalisis fenomena tersebut untuk menjawab pertanyaan mengapa Korea Utara memperkuat kerja sama pertahanan dengan Rusia di tengah tensi Semenanjung Korea yang semakin tinggi. Data dikumpulkan dari sumber primer berupa dokumen negara dan sumber sekunder berupa berita dan artikel ilmiah. Dengan menggunakan teori perimbangan kekuatan (balance of power), artikel ini mengungkapkan bahwa Korea Utara ingin memperkuat manpower, memperoleh keuntungan ekonomi, dan mengalihkan perhatian Amerika Serikat dari konflik Semenanjung Korea. Siasat yang dilakukan oleh Korea Utara dilakukan untuk persiapan konflik di masa depan.

Kata Kunci: *Invasi Rusia ke Ukraina, Korea Utara, Perimbangan Kekuatan Semenanjung Korea*

Pendahuluan

Kondisi di semenanjung Korea tengah dan semakin memanas. Dalam beberapa tahun ke belakang, Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan telah melaksanakan banyak latihan militer bersama, dengan jumlah anggota mulai dari ratusan sampai dengan ribuan (Bernhardt & Sukin, 2021). Latihan militer tersebut beragam dalam aktivitasnya, mulai dari pendaratan amfibi, perang anti kapal selam, bantuan udara, sampai dengan search and rescue (SAR) militer. AS dan Korea juga mengajak negara seperti Inggris dan

Australia dalam latihan militer tertentu. Mereka berkeyakinan bahwa latihan militer tersebut penting untuk memelihara kesiapan dan interoperabilitas. Latihan militer bersama AS-Korea Selatan bukanlah barang baru karena telah rutin dilakukan sejak 1997, dan menunjukkan komitmen kedua negara tersebut dalam hal aliansi dan kredibilitas pakta pertahanan.

Latihan militer bersama AS-Korea Selatan yang dilakukan rutin tersebut memperparah stabilitas di semenanjung Korea. Penelitian kuantitatif yang dilakukan oleh Bernhardt & Sukin (2021) menunjukkan bahwa Korea Utara sama sekali tidak terpengaruh oleh aktivitas tersebut dan malah memberikan respon yang sengit. Pyongyang memandang latihan militer AS-Korea Selatan sebagai ancaman yang nyata dan memberikan respon berdasarkan level ancaman yang diterima. Semakin besar dan dekat latihan militer yang dilakukan, semakin agresif respon dari Korea Utara. Dengan demikian penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kim Jong Un memiliki perhitungan strategis yang tidak bisa ditebak oleh Amerika Serikat dan sekutu.

Konflik di semenanjung Korea tidak akan mereda dalam waktu dekat seiring dengan aktivitas Jepang, Korea Selatan dan AS yang meningkatkan kerjasama trilateral dalam beberapa tahun terakhir (Choi, 2024). Kerja sama ini didasari pada aktivitas nuklir Korea Utara yang semakin meningkat. Ancaman dari Korea Utara juga berasal dari dinamika lingkungan strategis yang semakin memburuk. Pada tahun 2019, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menunjukkan kekecewaannya kepada janji-janji AS yang akan menguntungkan Korea Utara dalam resolusi konflik (Town, 2024). Sejak saat itu, pemerintah Korea Utara mengalami perubahan kebijakan dalam memandang politik internasional. Di tahun 2021, Korea Utara menyatakan bahwa Perang Dingin yang baru telah lahir dan semakin menguat. Dua tahun kemudian, Kim mengesahkan amandemen yang memastikan hak untuk tetap eksis, mencegah peperangan, dan melindungi kawasan regional dan perdamaian dunia dengan mengembangkan senjata nuklir dengan pesat. Kim menekankan peningkatan produksi dan diversifikasi sarana nuklir untuk serangan yang lebih efektif.

Di tengah kondisi semenanjung Korea yang semakin memburuk, Korea Utara mengalihkan perhatiannya kepada konflik di Eropa Timur. Secara terbuka Pyongyang mendukung invasi Rusia di Ukraina. Seminggu setelah invasi, petinggi Korea Utara menemui duta besar Rusia untuk Korea Utara. Kedutaan besar Rusia di Pyongyang tetap buka meskipun banyak kedutaan besar lain tutup karena kebijakan penutupan perbatasan di tengah pandemic (Pardo & Kim, 2022). Setelahnya, deputi kementerian luar negeri Rusia Igor Morgulov menemui duta besar Korea Utara untuk Rusia. Hal ini terlihat anomali karena banyak negara berusaha mengurangi hubungan diplomatik dengan Rusia setelah keputusan Moskow menginvasi Ukraina. Selain itu, Korea Utara merupakan salah satu dari lima negara yang mengambil sikap tidak setuju dalam pengambilan keputusan untuk mengecam Rusia di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada awal dan akhir Maret 2022.

Di Oktober tahun 2024, Korea Utara semakin memperlihatkan dukungannya ke Moskow sampai pada tahap operasional. Laporan dari AS, Ukraina dan Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan bahwa lebih dari 10 ribu tentara Korea Utara telah menginjakkan kaki di tanah Rusia (Aljazeera, 2024). Keadaan ini menimbulkan kekhawatiran dari ketiga negara tersebut mengenai eskalasi konflik yang mulai melibatkan pihak ketiga. Sebelumnya, pejabat sekretaris negara AS Robert Koepcke telah melaporkan bahwa Korea Utara telah mengirimkan bantuan persenjataan kepada Rusia sebanyak 16.500 kontainer sejak September 2023 yang diikuti oleh serangan dari Pihak Rusia yang semakin gencar (Smith, 2024). Di tengah pergolakan geopolitik yang semakin tidak dapat diprediksi di semenanjung Korea, Korea Utara malah mengalihkan perhatiannya ke Eropa Timur dan semakin memperkuat dukungan terhadap invasi

Rusia ke Ukraina. Untuk itu, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan mengapa Korea Utara semakin memperkuat dukungan kepada Rusia di tengah konflik semenanjung Korea yang semakin meningkat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan mengapa Korea Utara menguatkan kerja sama dengan Rusia di tengah situasi panas yang sedang terjadi di Semenanjung Korea. Menurut Sugiyono (2016) penelitian deskriptif kualitatif ditulis dengan tujuan menggambarkan, menerangkan, dan menjelaskan suatu fenomena secara rinci. Pada umumnya penelitian deskriptif kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci dan lebih menekankan pada makna daripada mengambil kesimpulan secara umum. Analisis data dari penelitian kualitatif bersifat induktif dari kata-kata atau gambar yang telah dikumpulkan dengan memperhatikan keadaan yang sebenarnya. Untuk dapat memperoleh keadaan yang sebenarnya, penulis mengumpulkan data dari sumber primer berupa dokumen pemerintah dan sumber sekunder berupa artikel ilmiah dan laman website yang bisa diandalkan informasinya.

Penulis menggunakan teori perimbangan kekuatan (*balance of power*) untuk menganalisis sikap dan tindakan Korea Utara yang memperkuat kerja sama dengan Rusia di tengah tensi tinggi Semenanjung Korea. Schweller (2016) secara ringkas telah berhasil mengumpulkan dan mensintesis pendapat-pendapat mengenai teori perimbangan kekuatan yang dikumpulkan dari para pakar Hubungan Internasional. Teori perimbangan kekuatan memiliki beberapa pengertian seperti 1) pendistribusian kekuatan yang merata, 2) prinsip bahwa kekuatan harus didistribusikan secara merata, 3) pendistribusian kekuasaan sebagai gambaran situasi politik yang terjadi dalam waktu tertentu, 4) prinsip pemerataan kekuatan negara kuat dengan mengorbankan negara lemah, 5) prinsip bahwa suatu negara harus mempunyai kekuatan yang lebih besar daripada negara lain, 6) peran yang dipunyai suatu negara untuk menjaga keseimbangan, dan 7) kecenderungan keadaan politik internasional yang menghasilkan pemerataan kekuatan.

Kenneth Waltz (1979) dalam bukunya *Theory of International Politics* berusaha membuat teori perimbangan kekuasaan menjadi lebih konsisten dan ilmiah dengan berfokus pada struktur politik internasional yang anarkis sehingga negara harus melindungi diri sendiri dengan melakukan perimbangan terhadap kekuatan besar yang mengancam. Perimbangan dapat dilakukan melalui cara eksternal dan internal. Cara internal dilakukan dengan mengarahkan sumber daya untuk memperkuat persenjataan, mengumpulkan sumber daya dan mengorganisir negara dengan baik dengan tujuan melindungi dan memperkuat diri sendiri agar dapat bersaing dengan lebih efektif. Negara juga dapat melakukan perimbangan eksternal dengan membentuk aliansi dengan negara lain untuk menghentikan hegemoni. Walaupun negara sulit secara historis sulit melakukan kerja sama, ketika dihadapkan oleh ancaman yang sama, negara-negara tersebut akan mengabaikan perselisihan dan memiliki untuk bersatu melawan negara dominan.

Meskipun demikian, teori perimbangan kekuatan masih berpolemik di konsep dasar berupa perimbangan (*balancing*) karena para pakar berpendapat perimbangan dapat dilakukan di banyak sektor seperti ekonomi, budaya, politik, strategi, bahkan ideologi (Heginbotham & Samuels, 1998). Selain itu, terdapat pula konsep perimbangan militer yang ditawarkan oleh Schweller (2016) yaitu pembentukan atau pengumpulan kekuatan militer melalui penambahan kekuatan domestik atau dengan membentuk aliansi untuk mencegah dominasi kekuatan dari luar. Dengan demikian, penulis menggunakan dua

pendekatan teori perimbangan kekuatan di atas dalam menganalisis keterlibatan Korea Utara dalam konflik Rusia-Ukraina.

Hasil dan Pembahasan

Konflik rusia-ukraina dan Kondisi Korea Utara

Keputusan NATO untuk memperluas keanggotaannya sampai ke Eropa Timur membuat ketidakstabilan keamanan di pihak Rusia. Hasilnya, Putin memutuskan untuk menginvasi Rusia pada tanggal 24 Februari 2022 dengan memanfaatkan berbagai alasan seperti dukungan dari rakyat Rusia, romantisasi kejayaan Uni Soviet, sampai dengan ketidakstabilan politik dan keamanan yang dibawa oleh NATO ke Moskow (Cho, 2022). Invasi Rusia berhadapan dengan perlawanan yang alot dari pihak Ukraina. Kedua pihak belum mencapai kesepakatan resolusi konflik dalam waktu dekat. Sampai pada bulan Januari tahun 2025, kedua pihak masih berkonfrontasi secara langsung terutama di wilayah perbatasan.

Serangan Rusia ke Ukraina secara jelas menunjukkan tantangan yang diberikan oleh Putin kepada orde internasional yang terbentuk pasca Perang Dunia Kedua (Brunk & Hakimi, 2022). Putin secara terbuka menentang bahwa Barat telah berusaha mengubah identitas Ukraina menjadi pihak yang anti Rusia. Dia menekankan bahwa Rusia dan Ukraina memiliki sejarah bersama yang tidak dapat terpisahkan. Pernyataan tersebut berusaha menjegal Ukraina untuk dapat menjadi negara yang berdaulat. Bagi Putin, Ukraina tetaplah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rusia. Untuk itu, segala kekuatan dari luar yang ingin memisahkan mereka harus menerima konsekuensinya.

Pernyataan Putin tersebut menjadi dasar Rusia dalam menginvasi Ukraina di awal tahun 2022. Ukraina telah menjadi tempat kontestasi antara Rusia dengan pihak Barat (Kusa, 2022). Pada minggu pertama invasi, Rusia berusaha menutup kota utama Ukraina yang terletak di utara, selatan, timur, dan timur laut. Pada minggu kedua sampai keempat, Rusia mengepung dan menutup kota-kota besar dari segala penjuru. Di minggu kelima sampai ketujuh, Rusia berhasil menduduki beberapa wilayah di sebelah timur dan selatan. Invasi Rusia atas Ukraina telah menjadi elemen kompetisi kekuatan besar dalam membentuk dan mengubah sistem internasional untuk beberapa tahun mendatang.

Konflik Rusia-Ukraina memberikan dampak langsung bagi perkembangan konflik di wilayah lain, salah satunya adalah tensi panas yang sedang terjadi di Semenanjung Korea. Selain secara lugas mendukung Rusia, konflik Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung juga memberikan ide baru bagi Korea Utara dalam menggunakan senjata nuklir mereka (Song, 2023). Di dalam periode konflik Rusia-Ukraina yang baru berjalan beberapa bulan, Korea Utara telah melaksanakan beberapa tes terhadap persenjataan mereka yang menjadi ancaman bagi Seoul dan Washington. Hal tersebut diperparah dengan pernyataan Putin yang menjelaskan bahwa penggunaan senjata nuklir dapat membalikkan kondisi Rusia yang sedang tertekan oleh perlawanan Ukraina di palagan perang. Dari sini muncul ketakutan bahwa normalisasi terhadap ancaman nuklir dapat mempengaruhi Kim Jong Un dalam memperkuat program nuklir Korea Utara.

Korea Utara termasuk negara yang lemah dari segi militer di wilayah Asia Timur (Pardo & Kim, 2022). Kepemilikan senjata nuklir menjadi hal yang tidak biasa ini wilayah ini. Namun, Korea Utara telah lama menjadi salah satu negara dengan kepemilikan senjata nuklir di kawasan. Meskipun begitu, dibandingkan dengan Cina dan Korea Selatan dan Jepang yang memperoleh perlindungan nuklir dari AS, Korea Utara tetap saja lemah dari segi militer. Perlengkapan dan teknologi militer Korea Utara jauh tertinggal dari negara-

negara di kawasan. Kondisi tersebut diperparah dengan anggaran pertahanan yang tidak bisa mengimbangi negara-negara tetangga.

Korea Utara semakin cenderung untuk memperkuat kerja sama dengan Rusia berdasar pada nasib yang sama setelah memperoleh sanksi internasional (Cho, 2022). Baik Korea Utara maupun Rusia tidak memiliki keraguan lagi untuk semakin harmonis setelah mereka terisolasi dari pasar global. Rusia memiliki kemampuan untuk menyediakan Korea Utara pasokan energi. Sebaliknya, Korea Utara bisa mendapatkan jaminan keamanan dari Rusia terhadap tensi yang terjadi di Semenanjung Korea. Terlebih lagi, melihat hubungan diplomatik yang semakin erat dengan Rusia, Korea Utara dapat berkonsentrasi mendapatkan status *de facto* sebagai negara bersenjata nuklir atau *nuclear-weapon state* (NWS) yang selama ini berusaha dilucuti oleh AS melalui program denuklirisasi (Hwang & Hwang, 2024). Korea Utara dan Rusia menunjukkan kesungguhan dalam memperkuat setelah pada awal bulan November 2024 meratifikasi traktat yang ditandatangani oleh Putin dan Kim Jong Un pada bulan Juni di tahun yang sama (Kuhn, 2024). *Comprehensive Strategic Partnership* (CSP) tersebut menyebutkan bahwa apabila salah satu pihak diinvasi, maka pihak lain harus memberikan bantuan di bidang militer dan bidang lainnya.

Tensi di Semenanjung Korea dan Kerja Sama Trilateral Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan

Kawasan Semenanjung Korea tidak pernah mengalami kondisi yang stabil setidaknya dalam dua dekade terakhir. Hal tersebut disebabkan oleh dampak panjang Perang Korea dan kepemilikan nuklir oleh Korea Selatan. Secara historis, Korea meluncurkan program nuklir pada tahun 1952 dengan bantuan teknologi dari Cina dan Uni Soviet. (Barannikova, 2022). Pada awalnya program nuklir tersebut digunakan untuk menanggulangi kekurangan energi yang dialami oleh Korea Selatan seiring dengan hancurnya banyak infrastruktur selama Perang Korea. Pada tahun 1970an, Korea Utara meluncurkan kebijakan *byungjin* atau pembangunan yang beriringan antara sektor ekonomi dan sektor nuklir. Penggunaan bom nuklir oleh Amerika Serikat kepada kota Hiroshima dan Nagasaki, pengetesan bom nuklir oleh Uni Soviet, dan juga eksperimen nuklir oleh Korea Selatan menyertai niat Korea Utara untuk mengembangkan nuklir untuk keperluan militer pada saat itu.

Barannikova (2022) telah menyusun setidaknya ada 6 motif yang digunakan oleh Korea Utara dalam menyusun program nuklirnya. Pertama motif keamanan yang muncul selama Perang Korea. Presiden Amerika Serikat Donald Truman pada saat itu mengungkapkan bahwa ada kemungkinan penggunaan nuklir dalam perang tersebut. Selain itu, Amerika pada tahun 1950an memiliki senjata nuklir yang lebih banyak daripada Uni Soviet sebagai sekutu Korea Utara. Kedua adalah motif kebijakan luar negeri yang muncul dari peristiwa sejarah dimana Rusia dan Amerika Serikat tidak menginginkan dua Korea untuk merdeka dan malah memisahkan mereka dengan pemerintahan yang saling bermusuhan. Ketiga adalah motif teknologi yang memungkinkan Korea Utara untuk mendapatkan akses teknologi nuklir paling canggih pada saat itu dari Uni Soviet. Keempat adalah motif harga diri sebagai mantan negara jajahan yang ingin mendapatkan nama baik di dunia internasional sebagai negara dengan teknologi nuklir untuk penggunaan sipil. Kelima adalah sebagai amanat konstitusi yang digunakan sebagai kebijakan domestik dan propaganda. Keenam adalah motif ekonomi yang dinilai lebih efisien daripada harus melakukan perlombaan senjata konvensional dengan negara-negara dengan ekonomi kuat. Dari keenam motif di atas, motif keamanan dan ekonomi menjadi poin penting jika berhadapan dengan kondisi faktual di Semenanjung Korea. Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat menguatkan kerja sama pertahanan mereka. Sementara itu, ekonomi Korea Utara jauh tertinggal dari Korea Selatan sejak tahun 1960an (D. Kim, 2021).

Tensi di kawasan memanas sejak 2021 ketika Korea Utara meluncurkan lebih dari 80 misil termasuk di antaranya adalah misil balistik antar benua (ICBM) yang bisa mengangkut hulu ledak nuklir (CRS, 2024). Di tahun 2023 keadaan Semenanjung Korea tidak bertambah baik. Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengesahkan amandemen yang menyatakan bahwa Korea Utara berhak untuk melindungi kepentingannya, mencegah perang, dan menjaga kestabilan di kawasan dan global dengan meningkatkan laju produksi senjata nuklir beserta sarana peluncurannya (Town, 2024). Selain itu, Korea Utara telah meninggalkan doktrin bahwa senjata nuklir mereka hanya akan digunakan untuk membalas serangan lawan (J. Kim, 2024). Kebijakan baru memungkinkan Korea Utara untuk melakukan *pre-emptive strike* atau serangan pertama dalam skenario peperangan kepada musuh dan bahkan sekutu mereka. Senjata nuklir tetap berfungsi sebagai daya tangkal namun penggunaannya diperluas. Selain itu, untuk meningkatkan fleksibilitas target, Korea Utara telah meningkatkan jenis dan jumlah saran peluncuran senjata nuklir dan juga meremajakan infrastruktur yang tersedia.

Kemunduran hubungan Korea Utara dan Korea Selatan dapat dilihat setidaknya dari tiga alasan (Bondaz, 2020). Pertama adalah sanksi internasional kepada Korea Utara memunculkan rasa frustrasi baik dari Pyongyang dan Seoul untuk dapat memperbaiki hubungan karena hanya memperparah keterbatasan Seoul untuk berkomunikasi lebih intens dengan Pyongyang. Kedua bahwa Seoul telah mencapai batas atas untuk berhubungan dengan Korea Utara tanpa melanggar perjanjian internasional. Ketiga adalah baik Seoul dan Pyongyang tidak lagi memiliki prioritas yang sama. Bagi Pyongyang, hubungan dengan Seoul hanyalah sebatas mencari keuntungan. Sedangkan Seoul tidak lagi dapat mengubah minimnya keinginan Pyongyang dalam menormalisasi hubungan.

Tensi di Semenanjung Korea semakin tinggi dengan meningkatnya kehadiran kekuatan dari luar kawasan. Di tahun 2023, Amerika Serikat bersama Korea Selatan dan Jepang meresmikan kerja sama trilateral di Camp David (CRS, 2023). Biden mengajak Presiden Korea Yoon dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida untuk meningkatkan kerja sama tersebut ke kerja sama tingkat tinggi, termasuk pertemuan pemimpin tahunan untuk menyusun strategi di Indo-Pasifik, respon krisis tiga arah, dan meluaskan latihan militer trilateral. Peningkatan ancaman merupakan salah satu faktor yang mendorong kerja sama trilateral ini (Choi, 2024). Cina dipandang telah melakukan perimbangan kekuatan dengan Amerika Serikat dan telah dipandang sebagai kompetitor utama dalam politik internasional dalam jangka panjang. Sedangkan Korea Utara juga telah dipandang sebagai ancaman yang semakin serius seiring dengan progress senjata nuklir dan aktivitas pengetesan misil yang mereka lakukan.

Dalam pernyataan resmi berjudul Camp David Principles, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang menyatakan:

We stand united in our commitment to the complete denuclearization of the Democratic People's Republic of Korea (DPRK) in accordance with relevant United Nations Security Council resolutions. We remain committed to dialogue with the DPRK with no preconditions. We seek to address human rights and humanitarian issues, including the immediate resolution of the issues of abductions, detainees, and unrepatriated prisoners of war. We support a unified Korean Peninsula that is free and at peace. (The White House, 2023a).

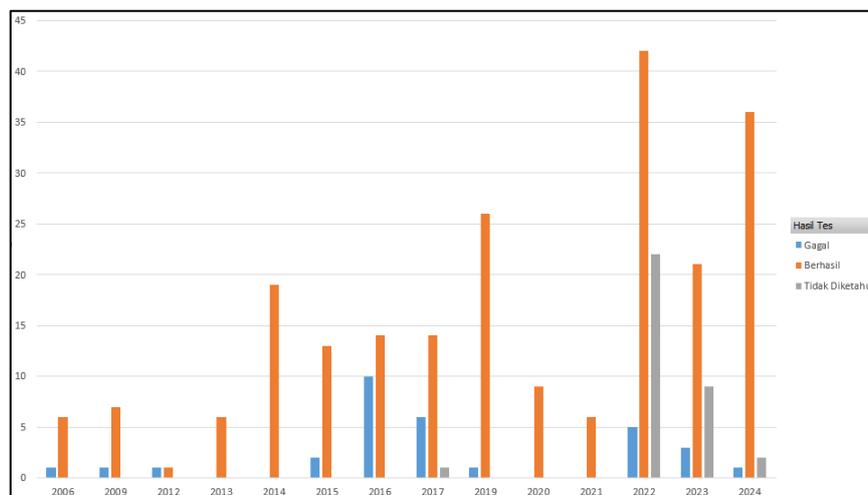
Pernyataan tersebut dielaborasi dalam sebuah joint statement dengan menyatakan bahwa:

We strongly condemn the DPRK's unprecedented number of ballistic missile launches, including multiple intercontinental ballistic missile (ICBM) launches and conventional military actions that pose a grave threat to peace and security on the Korean Peninsula and beyond. We express concern regarding the DPRK's illicit cyber activities that fund its unlawful WMD and ballistic missile programs. We announce the establishment of a new trilateral working group to drive our cooperation, including with the international community, to combat DPRK cyber threats and block its cyber-enabled sanctions evasion. Japan, the ROK, and the United States remain committed to reestablishing dialogue with the DPRK with no preconditions. (The White House, 2023b).

Kerja sama trilateral negara-negara tersebut bukanlah sebuah kerja sama yang tidak memiliki tindak lanjut. Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang terus menghasilkan progress yang baik dalam pertemuan tingkat tinggi. Pertemuan Camp David menjadi pondasi dalam topik yang dibahas oleh ketiga negara di The 15th Republic of Korea-United States-Japan Defense Trilateral Talks pada tanggal 9 September 2024. Mereka sepakat untuk meningkatkan daya tangkal (deterrence) kepada Korea Utara yang telah melakukan ancaman misil dan nuklir (US Department of Defense, 2024a). Selain itu, ketiga negara juga terus memantau perkembangan hubungan baik yang dilakukan oleh Rusia dan Korea Utara. Melihat fenomena yang terjadi sekarang ini, maka akan dapat dengan mudah dimengerti bahwa usaha untuk meruntuhkan struktur Perang Dingin di Semenanjung Korea membutuhkan waktu yang lama dan usaha yang lebih keras dari berbagai pihak yang terlibat (Davydov & Novichkova, 2020).

Menunjukkan Manpower, bukan Hanya Tes Nuklir

Korea Utara telah lama melakukan serangkaian uji misil. Tujuan utama dari uji coba tersebut adalah untuk menunjukkan daya tangkal kepada musuh utama mereka yaitu Korea Selatan. Sejak Amerika Serikat dan Korea Selatan menandatangani pakta pertahanan di tahun 1953, Korea Utara juga secara otomatis menganggap dua negara tersebut sebagai ancaman bagi negaranya. Dengan terbatasnya kekuatan militer dan anggaran pertahanan yang dimiliki, maka masuk bagi Korea Utara untuk tetap mempercayai daya tangkal yang dihasilkan dari uji misil yang mereka rutin lakukan. Data dari The James Martin Center for Nonproliferation Studies (CNS) (2024) menunjukkan bahwa Korea Utara meningkatkan tes misil mereka setelah sempat menurun pada awal pandemi Covid-19 di tahun 2020-2021.



Gambar 1. Peluncuran Rudal Korea Utara (2006-2024)
Sumber: CNS (2024)

Berdasarkan teori perimbangan kekuasaan yang disampaikan oleh Kenneth Waltz (1979), apa yang dilakukan oleh Korea Utara dengan pengujian misil mereka adalah berusaha untuk melakukan perimbangan dengan pendekatan internal melalui penguatan sumber daya. Doktrin nuklir baru dari Korea Utara di tahun 2022 memutuskan mereka dapat melakukan inisiasi dalam sebuah peperangan dan bukan lagi menunggu untuk diserang (Cheong, 2023). Kim Jong Un menyampaikan bahwa Korea Utara akan meningkatkan kapasitas mereka dalam memproduksi persenjataan dan memperkaya sarana peluncuran senjata nuklir. Dalam beberapa dekade ke belakang cara ini selalu dipercaya oleh Kim untuk melakukan daya tangkal kepada musuh mereka di Semenanjung Korea maupun sampai ke dataran Amerika.

Modernisasi kekuatan nuklir yang dimiliki oleh Korea Utara dan usaha denuklirisasi yang dipimpin oleh Amerika Serikat saling berhadapan dan menemui titik buntu. Saat ini Kim Jong Un tidak lagi mau berkompromi dengan Barat demi memenuhi kepentingan nasional Korea Utara. Kondisi geopolitik Semenanjung Korea yang tidak stabil semakin diperparah dengan penandatanganan kerja sama pertahanan trilateral oleh Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang. Bagi ketiga negara tersebut, Korea Utara sejak lama telah menjadi ancaman bagi tatanan dunia liberal. Sementara itu bagi Korea Utara, trio AS, Korea Selatan, dan Jepang tersebut meningkatkan persepsi bahwa ancaman yang ada semakin besar dan semakin mendekat ke wilayah kedaulatan mereka. Korea Utara mau tidak mau harus mencari alternatif daya tangkal di luar kekuatan nuklir yang sudah ada.

Invasi Rusia terhadap Ukraina mengubah pemikiran Kim Jong Un dalam melakukan praktik daya tangkal kepada musuh. Medan perang di perbatasan Ukraina-Rusia menjadi saksi bahwa jumlah pasukan tempur tetap menjadi faktor penentu dalam sebuah peperangan konvensional. Rusia dilaporkan telah kehilangan 610 ribu prajurit dengan tingkat kematian seribu prajurit per harinya (Cancian & Park, 2024). Fakta tersebut memberitahu bahwa selama senjata nuklir belum digunakan, maka faktor tentara konvensional tetap signifikan. Kim Jong Un mengetahui hal ini dan berusaha untuk memperbaiki sektor kapabilitas prajurit dalam kekuatan militer Korea Utara (The Strait Times, 2024). Perimbangan kekuatan yang dilakukan oleh Korea Utara kepada Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang yang selama ini hanya mengandalkan ancaman nuklir telah didukung oleh *manpower* yang saat ini tengah dibangun oleh Kim Jong Un (Yu, 2025).

Beberapa sumber melaporkan bahwa Korea Utara telah mengirimkan 10 ribu pasukan ke daratan Rusia untuk membantu invasi (Cha, 2024). Pengiriman pasukan ini sangat krusial bagi peningkatan kapasitas dan kapabilitas tentara Korea Utara dalam mendukung upaya perimbangan sekaligus penguatan daya tangkal. Pasukan yang dikirim dapat memperoleh pengalaman tempur yang sangat jarang didapatkan di masa pelatihan. Medan perang terakhir yang mereka pijak adalah Perang Korea di tahun 1950an. Meskipun dalam banyak sumber berita belum diketahui peran apa yang diemban oleh pasukan Korea Utara, pengalaman tempur yang asli dapat meningkatkan kapabilitas mereka di bidang komando, pengendalian drones, dan juga peperangan elektronik dalam perang modern (Hird et al., 2024). Keberadaan tentara Korea Utara di palagan perang Eropa Timur ini mendukung konsep perimbangan militer yang disampaikan oleh Schweller (2016) yang menyatakan bahwa perimbangan hanya terjadi ketika suatu negara menargetkan kekuatan militer negara lain.

Korea Utara lebih menekankan proses daripada hasil dalam pengiriman prajurit mereka ke medan tempur di perbatasan Rusia-Ukraina. Bagaimana hasilnya nanti, Kim Jong Un telah berusaha meningkatkan kapabilitas pasukannya dengan pengalaman tempur yang nyata. Pasukan yang kembali dari medan tempur dapat membagikan pengalaman tempur mereka kepada prajurit yang tengah bersiap dalam konflik Semenanjung Korea.

Moral pasukan Korea Utara dapat naik secara signifikan. Yang lebih penting lagi, bantuan prajurit Korea Utara ke Rusia membuktikan kesungguhan Kim Jong Un dalam melakukan perimbangan kekuatan kepada negara-negara yang dianggap berbahaya.

Membentuk Aliansi Berlandaskan Ekonomi

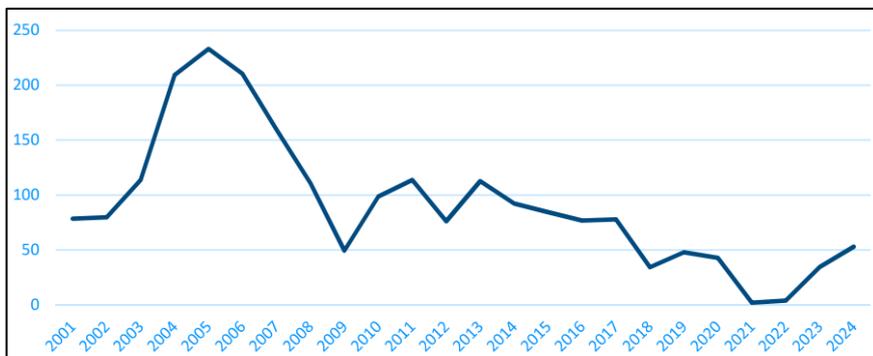
Selain meningkatkan kekuatan secara internal, suatu negara juga melakukan perimbangan dengan kekuatan yang mereka anggap sebagai ancaman dengan melakukan perimbangan eksternal melalui pembentukan aliansi (Waltz, 1979). Pernyataan dari Waltz tersebut nyata adanya dari apa yang dilakukan oleh Korea Utara kepada Rusia dengan mengirimkan prajurit dan persenjataan setidaknya setelah kehadiran Amerika Serikat yang semakin menguat dalam konflik Semenanjung Korea. Dalam segi pertahanan, komitmen Amerika Serikat untuk membantu keamanan di Semenanjung Korea telah dilakukan sejak penandatanganan pakta pertahanan dengan Korea Selatan di tahun 1953. Hubungan kedua negara semakin menguat dibuktikan dengan penempatan kurang lebih 28 ribu tentara Amerika Serikat di tanah Korea (CRS, 2023). Komitmen Amerika Serikat terhadap sekutu di Semenanjung Korea diperkuat dengan sebuah pertemuan di Camp David di tahun 2023 yang menghasilkan perjanjian keamanan trilateral Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang.

Penguatan hubungan Korea Utara dan Rusia secara jelas memperlihatkan komitmen kedua negara dalam membentuk aliansi untuk melawan ancaman bersama. Korea Utara, dengan kekuatan militer masih berada di bawah kekuatan militer negara-negara Asia Timur membutuhkan sekutu yang memiliki persepsi ancaman yang sama dan sekaligus memiliki kemampuan militer yang sebanding untuk melawan ancaman tersebut. Maka akan sangat logis bagi Korea Utara untuk membentuk aliansi dengan Rusia yang sedang berusaha merevisi kondisi tatanan global dengan melawan Barat secara tidak langsung dalam pertempuran dengan Ukraina. Persepsi ancaman memaksa Korea Utara dan Rusia untuk bertemu dan bekerja sama di bidang keamanan dan pertahanan meskipun memiliki kepentingan yang berbeda. Korea Utara berusaha melawan ancaman yang menguat di Semenanjung Korea. Sementara Rusia berusaha menghentikan perluasan kekuatan asing yang datang dari arah barat. Terlepas dari itu semua, mereka memiliki ancaman yang sama; pihak Barat yang sedang memperluas hegemoninya.

Namun begitu, peningkatan hubungan Korea Utara dan Rusia tidaklah semata-mata membentuk aliansi berdasarkan kepentingan keamanan. Dalam hal ini, masing-masing pihak membawa kepentingan ekonomi dengan latar belakang yang relatif sama yaitu dampak dari sanksi internasional. Sanksi ekonomi negara-negara Barat kepada Rusia berdampak pada tekanan ekonomi domestik terutama di tahun pertama invasi dilakukan (Preble & Willis, 2024). Inflasi di Rusia meningkat dari 6,7% ke 13,8% di tahun 2022. PDB Rusia juga mengalami penurunan dari 3% ke angka 4%. Di awal tahun 2024, impor yang dilakukan Rusia juga terus mengalami penurunan dalam tiga kuartal terakhir akibat dari tekanan yang dilakukan oleh Amerika Serikat kepada bank-bank negara ketiga yang berhubungan dengan Rusia (Vasily Astrov et al., 2024). Sanksi ekonomi lebih terlihat jelas di dalam kasus Korea Utara. Ekspor mengalami kemunduran signifikan dari 2,82 miliar USD ke angka 280 juta USD di tahun 2019 (Lim, 2024). Selanjutnya di tahun 2020 ke 2021, ekspor rata-rata tahunan Korea Utara sebesar 80 juta USD berbanding jauh dengan nilai impor yang mencapai 700 juta USD. Angka tersebut jauh di bawah nilai ekspor dan impor Korea Utara sebelum dijatuhi sanksi ekonomi di tahun 2016.

Maka dari itu, pengiriman prajurit dan misil serta persenjataan Korea Utara ke Rusia juga tidak lepas dari kepentingan ekonomi. Korea Utara ingin meningkatkan nilai ekspor mereka. Sementara Rusia dapat menurunkan tensi tekanan publik akibat dari mobilisasi massa yang dilakukan untuk melawan Ukraina sembari menguatkan ekonomi yang

sedang mengalami tren positif (Cancian & Park, 2024). Di tengah eskalasi Rusia-Ukraina dan tensi tinggi di Semenanjung Korea, perdagangan Rusia-Korea Utara mengalami peningkatan sejak tahun 2022 sampai dengan 2024. Di tahun 2022, volume perdagangan kedua negara yang hanya sebesar 3,78 juta USD meningkat sembilan kali lipat ke angka 34.4 juta USD di tahun 2023 dan kembali naik sebesar 52,9 juta USD di 2024 (Guseinova, 2024).



Gambar 2. Tren Perdagangan Korea Utara-Rusia (2021-2024)

Sumber: Guseinova (2024)

Angka perdagangan senjata juga termasuk besar. Guseinova pada laporan yang sama mengestimasi bahwa angka perdagangan senjata Korea Utara ke Rusia saat ini mencapai 5,5 miliar USD. Nilai dagang ini didukung dengan data bahwa sejak bulan Agustus 2023, terdapat paling tidak 25 kunjungan ke Najin untuk bongkar muat amunisi dari Korea Utara dan 19 kapal yang bersandar di Pelabuhan Vostochny di Rusia (Jr et al., 2024). Nilai dagang persenjataan ini dapat saja lebih tinggi apabila ada data resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Rusia dan Korea Utara. Terlebih lagi, hubungan dagang ini memberikan bukti bahwa kedua negara bisa bermanuver dalam menghindari dampak sanksi ekonomi internasional dan meningkatkan kekuatan militer dalam waktu yang sama.

Mengalihkan Amerika Serikat dari Semenanjung Korea

Kehadiran Amerika Serikat di Semenanjung Korea yang semakin menguat memberikan kekhawatiran bagi Kim Jong Un. Daya tangkal yang dimiliki oleh Korea Utara melalui kekuatan nuklir dengan tujuan melakukan perimbangan kepada Korea Selatan dan sekutunya tidak menghasilkan penurunan eskalasi di wilayah tersebut. Selain itu, konflik Rusia-Ukraina memberikan pembelajaran bahwa kekuatan senjata nuklir tidak menentukan dalam sebuah perang konvensional di zaman modern. Perhitungan risiko untuk menggunakan senjata nuklir semakin rumit. Untuk itu, apa yang dilakukan oleh Korea Utara dengan membangkitkan dan memperkuat aliansi dengan Rusia bertujuan untuk mengalihkan perhatian Amerika Serikat dari geopolitik di Semenanjung Korea.

Teori perimbangan kekuatan menjelaskan bahwa negara melakukan perimbangan kekuatan secara eksternal dengan membentuk aliansi berdasarkan persepsi ancaman yang sama. Korea Utara dengan jelas mendukung teori ini dengan mendekati Rusia yang juga menganggap Amerika Serikat sebagai ancaman. Ukraina telah menjadi medan perang proksi bagi Amerika Serikat untuk melawan Rusia dengan mengirimkan bantuan. Sampai bulan November 2024, Amerika Serikat telah memberikan bantuan militer sebesar 64 miliar USD kepada Ukraina sejak Rusia menginvasi di akhir bulan Februari 2022 (U.S. Department of State, 2024). Perang proksi ini ditiru oleh Korea Utara. Kim Jong Un menentang Korea Selatan dan Amerika Serikat secara tidak langsung di medan perang Rusia-Ukraina. Perang proksi aktor-aktor Semenanjung

Korea di Eropa Timur telah dimulai ketika Korea Utara memutuskan untuk mengirimkan prajurit dan persenjataan militer kepada Rusia, menyusul Amerika Serikat yang sebelumnya telah membantu Ukraina.

Pembentukan aliansi oleh Korea Utara dan Rusia berujung pada perang proksi dengan tujuan akhir mengalihkan perhatian Amerika Serikat dari Semenanjung Korea. Strategi Korea Utara tersebut tidak sepenuhnya berhasil mengusir Amerika Serikat dari konflik Korea, namun setidaknya memecah fokus Amerika Serikat dalam menjaga arsitektur keamanan global yang mulai direvisi oleh kekuatan lain. Dalam sebuah pertemuan rutin menteri pertahanan Korea Selatan dan Amerika Serikat pada akhir Oktober 2024 yang fokusnya membahas keamanan Semenanjung Korea dan Indo-Pasifik, menteri Lloyd J. Austin memperlihatkan pecahnya fokus Amerika Serikat dengan membahas kondisi konflik Rusia-Ukraina yang semakin memanas dengan datangnya bantuan tentara oleh Korea Utara (US Department of Defense, 2024b).

Pengalihan fokus dan kewajiban Amerika Serikat di Eropa Timur akan menurunkan tensi konflik di Semenanjung Korea. Data jumlah penempatan prajurit AS di Korea Selatan yang dihimpun oleh CSIS (2025) telah menunjukkan gejala ini. Dari 30 ribu prajurit AS yang ditempatkan di Korea Selatan pada tahun 2013, hanya tersisa 24 ribu yang aktif di tahun 2024 atau turun sebesar 20% dalam sebelas tahun terakhir. Hal ini menjadi berita baik bagi Korea Utara yang sedang dalam peningkatan kapasitas nuklir dan *manpower*. Eskalasi daya tangkal secara langsung dan menerus dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat hanya akan membuat Kim Jong Un meneruskan doktrin nuklir yang semakin tidak sesuai dengan kebutuhan ketika perang konvensional meletus. Korea Utara yang sekarang tidak lagi mengandalkan nuklir sebagai daya tangkal. Mereka ingin menjadi negara dengan kekuatan militer yang merata di setiap aspeknya.

Kesimpulan

Korea Utara tidak mampu menghadapi Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang sendirian dalam eskalasi konflik yang terjadi di Asia Timur. Belajar dari invasi Rusia ke Ukraina, Kim Jong Un menilai bahwa peperangan konvensional masih terjadi di era modern. Untuk itu siasat daya tangkal melalui kekuatan nuklir yang mereka lakukan selama ini perlu didukung oleh aspek lain. Korea Utara menilai bahwa konflik Rusia-Ukraina dapat mendukung kepentingan mereka dalam hubungannya dengan tensi yang terjadi di Semenanjung Korea. Untuk itu, Kim Jong Un mengirimkan tentaranya untuk mengisi kekurangan kombatan yang dialami oleh Rusia. Pengiriman ini dapat menjadi titik balik bagi kekuatan militer Korea Utara. Tentara yang dikirim akan mendapatkan pengalaman tempur yang luar biasa bagaimana pun nanti tugas dan fungsi mereka di lapangan. Pengalaman tersebut dapat memperbarui doktrin tempur mereka yang selama ini tidak digunakan dalam palagan perang.

Rusia juga telah menjadi aktor utama bagi Korea Utara di sektor finansial. Pengiriman bantuan persenjataan militer secara nyata telah meningkatkan nilai perdagangan kedua negara. Perdagangan ini sangat penting bagi Korea Utara untuk meningkatkan ekonomi domestik mereka, sekaligus sumber dana dalam modernisasi kekuatan nuklir yang sudah ada. Pada akhirnya, melihat pola yang muncul pada bagian pembahasan penelitian ini, tujuan akhir dari Korea Utara dalam menguatkan aliansi dengan Rusia adalah untuk mengalihkan perhatian Amerika Serikat di Semenanjung selain memperkuat faktor *manpower* dan ekonomi dalam waktu yang sama. Dari sini kemudian muncul sebuah pertanyaan yang dapat menjadi penelitian selanjutnya, bagaimana strategi Amerika Serikat menjaga arsitektur keamanan global di tengah konflik Rusia-Ukraina dan konflik Semenanjung Korea yang sama-sama meningkat? Pertanyaan ini menjadi penting dan relevan di tengah pergeseran kerangka keamanan internasional

yang sedang menuju era *multipolar* dan sifat transaksional yang dilakukan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump.

Daftar Pustaka

- Aljazeera. (2024). *North Korean troops reportedly on Russian front lines amid escalation fears* _ Russia-Ukraine war News _ Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2024/11/5/north-korean-troops-reportedly-on-russian-front-lines-amid-escalation-fears>
- Barannikova, A. (2022). Korean Peninsula Nuclear Issue: Challenges and Prospects. *Journal for Peace and Nuclear Disarmament*, 5(sup1), 50–68. <https://doi.org/10.1080/25751654.2022.2053409>
- Bernhardt, J., & Sukin, L. (2021). Joint Military Exercises and Crisis Dynamics on the Korean Peninsula. *Journal of Conflict Resolution*, 65(5), 855–888. <https://doi.org/10.1177/0022002720972180>
- Bondaz, A. (2020). The lull before the storm: the worst may be yet to come in the Korean Peninsula. *North*, 16(IV), 1–7. http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_en/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_in/zonas_in/ari111-2020-bondaz-the-lull-before-the-storm-worst-may-be-yet-to-come-in-korean-peninsula
- Brunk, I. W., & Hakimi, M. (2022). Russia, Ukraine, and the Future World Order. *American Journal of International Law*, 116(4), 687–697. <https://doi.org/10.1017/ajil.2022.69>
- Cancian, M. F., & Park, C. H. (2024). *North Korean Troops Deploy to Russia : What 's the Military Effect ?* Csis.Org. <https://www.csis.org/analysis/north-korean-troops-deploy-russia-whats-military-effect>
- Cha, V. (2024). *Crossing the Rubicon : DPRK Sends Troops to*. Csis.Org. <https://www.csis.org/analysis/crossing-rubicon-dprk-sends-troops-russia>
- Cheong, W. S. (2023). The DPRK's Changed Nuclear Doctrine: Factors and Implications. *Journal for Peace and Nuclear Disarmament*, 6(1), 136–147. <https://doi.org/10.1080/25751654.2023.2188859>
- Cho, H.-B. (2022). *Evaluation of the Ukraine Crisis and Prospects on Changes in International Order*.
- Choi, W. (2024). *New Horizons in Korea-U . S . -Japan Trilateral Cooperation*. CSIS. <https://www.csis.org/analysis/new-horizons-korea-us-japan-trilateral-cooperation>
- CNS. (2024). *The CNS North Korea Missile Test Database*. Nti.Org. <https://www.nti.org/analysis/articles/cns-north-korea-missile-test-database/>
- CRS. (2023). *U . S . -South Korea Alliance : Issues for Congress*. <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11388>
- CRS. (2024). *South Korea : Background and U . S . Relations*.
- CSIS. (2025). *The Meaning of U.S. Troop Withdrawals from Korea*. Csis.Org. <https://www.csis.org/analysis/meaning-us-troop-withdrawals-korea>

- Davydov, O. V., & Novichkova, M. N. (2020). The Peace Process on the Korean Peninsula: Problems and Ways of Development. *Herald of the Russian Academy of Sciences*, 90(4), 470–475. <https://doi.org/10.1134/S1019331620040085>
- Guseinova, O. (2024). Putin's Partner: North Korea's Cooperation with Russia amid the War against Ukraine. In *Friedrich Naumann Stiftung for Freedom Korea*.
- Heginbotham, E., & Samuels, R. J. (1998). *Mercantile Realism and Eric Heginbotham and Japanese Richard J. Samuels*. 22(4), 171–203.
- Hird, K., Shats, D., & Neil, A. O. (2024). *North Korea Joins Russia's War Against Ukraine: Operational and Strategic Implications in Ukraine and Northeast Asia*. Understandingwar.Org. <https://www.understandingwar.org/backgrounder/north-korea-joins-russias-war-against-ukraine-operational-and-strategic-implications>
- Hwang, Y., & Hwang, J. (2024). Out of Fire into the Frying Pan? The Ripple Effect of the Russia–Ukraine War on Korean Denuclearization. *Peace Review*, 0(0), 1–11. <https://doi.org/10.1080/10402659.2024.2414031>
- Jr, J. S. B., Cha, V., & Jun, J. (2024). *Major Munitions Transfers from North Korea to Russia - Beyond Parallel*. Beyondparallel.Csis.Org. <https://beyondparallel.csis.org/major-munitions-transfers-from-north-korea-to-russia/>
- Keith A. Preble, & Willis, C. N. (2024). *How Russia has managed to shake off the impact of sanctions – with a little help from its friends*. The Conversation. <https://theconversation.com/how-russia-has-managed-to-shake-off-the-impact-of-sanctions-with-a-little-help-from-its-friends-223632>
- Kim, D. (2021). The great divergence on the Korean peninsula (1910–2020). *Australian Economic History Review*, 61(3), 318–341. <https://doi.org/10.1111/aehr.12225>
- Kim, J. (2024). *Strategic stability on the Korean Peninsula: Dual Crisis and Risk Reduction Measures* (Issue February, pp. 3–22). Aska-Pacific Leadership Network. https://www.europeanleadershipnetwork.org/wp-content/uploads/2024/02/05_02_South-Korea-framing-paper.pdf
- Kuhn, A. (2024). *The treaty between Russia and North Korea signals a new era on 2 continents* _ NPR. NPR. <https://www.npr.org/2024/11/15/nx-s1-5188400/russia-north-korea-treaty>
- Kusa, I. (2022). Russia-Ukraine War: Harbinger of a Global Shift. *Policy Perspectives*, 19(1), 7–12. <https://doi.org/10.13169/polipers.19.1.ca2>
- Lim, S. (2024). *Insights from Statistical and Survey Data The Impact of North Korea Sanctions* : (Vol. 105, Issue 2).
- Pardo, R. P., & Kim, Y. I. (2022). Russia's Invasion of Ukraine and China – North Korea Relations Stronger Weak – Great Power Alignment. *Asian Survey*, 62(5), 1–25.
- Schweller, R. L. (2016). *The Balance of Power in World Politics*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.119>
- Smith, J. (2024). *North Korean weapons extending Russian stockpiles, German general says* _ Reuters. Reuters. <https://www.reuters.com/world/north-korean-weapons-extending-russian-stockpiles-german-general-says-2024-09-09/>
- Song, H. (2023). The Impact of the Russia-Ukraine War on the DPRK Nuclear Issue. *Advances in Applied Sociology*, 13(03), 260–272.
- Global & Policy Vol.13, No.01, Januari-Juni 2025*

<https://doi.org/10.4236/aasoci.2023.133016>

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. In *Alfabeta, Bandung*. Alfabeta.

The Strait Times. (2024). *North Korea's Kim Urges Improved Military Capabilities for War*. Straittimes.Com. <https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/north-koreas-kim-urges-improved-military-capabilities-for-war>

The White House. (2023a). *Camp David Principles _ The White House*. Whitehouse.Gov. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/08/18/camp-david-principles/>

The White House. (2023b). *The Spirit of Camp David: Joint Statement of Japan, the Republic of Korea, and the United States*. Whitehouse.Gov. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/08/18/the-spirit-of-camp-david-joint-statement-of-japan-the-republic-of-korea-and-the-united-states/>

Town, J. (2024). *Has Conflict on the Korean Become Inevitable?* Armscontrol.Org. <https://www.armscontrol.org/act/2024-03/features/has-conflict-korean-peninsula-become-inevitable#endnote03>

U.S. Department of State. (2024). *U.S. Security Cooperation with Ukraine*. State.Gov. <https://www.state.gov/u-s-security-cooperation-with-ukraine/>

US Department of Defense. (2024a). *Joint Statement of the 15th Republic of Korea-United States-Japan Defense Trilateral Talks _ U*. Defense.Fov. <https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3900255/joint-statement-of-the-15th-republic-of-korea-united-states-japan-defense-trila/>

US Department of Defense. (2024b). *U.S., South Korea Concerned North Koreans May Soon Fight Against Ukrainians*. Defense.Gov. <https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3951961/us-south-korea-concerned-north-koreans-may-soon-fight-against-ukrainians/>

Vasily Astrov, Teti, F., Scheckenhofer, L., & Semelet, C. (2024). Impact of sanctions on the Russian economy. In *Consilium.Europa.Eu* (Vol. 3). <https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/impact-sanctions-russian-economy/>

Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics*. McGraw-Hill. <https://books.google.co.id/books?id=j6qOAAAAMAAJ>

Yu, H. (2025). *Inside Kim Jong Un's Threat Perception – The Diplomat*. Thediplomat. <https://thediplomat.com/2025/05/inside-kim-jong-uns-threat-perception/>